

RANCANGAN AKHIR
BENCANA STRATEGIS
TAHUN 2021 - 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Bidang Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dengan tersusunnya Renstra ini diharapkan akan terciptanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang berlandaskan pada visi dan misi Kabupaten yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026.

Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada semua pihak, khususnya kepada saudara-saudara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah berpartisipasi dalam mempersiapkan dan merumuskan kebijakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dituangkan dalam Renstra.

Kuala Tungkal, Mei 2022

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

APRI DASMAN, S.ST, MT.
NIP. 19730405 199303 1 004





DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG..... | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM | 2 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN | 4 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 5 |
| BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD | 7 |
| 2.2 TUGAS,FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD..... | 7 |
| 2.3 SUMBER DAYA SKPD..... | 14 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI | 25 |
| 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD | 25 |
| 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH | 27 |
| 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PU PERA DAN RENSTRA PROVINSI..... | 30 |
| 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS | 32 |
| 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS..... | 34 |
| BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN | 35 |
| BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 40 |
| BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN | 41 |
| BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN | 50 |
| BAB VII PENUTUP | 52 |





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH Makruf Amin, yang sering disebut dengan **Nawacita**, salah satunya yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dimana program utama adalah pembangunan infrastruktur, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sepenuhnya akan mendukung program pemerintah sebagaimana tersebut di atas, di samping itu sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam pembangunan Infrastruktur dasar, Sarana dan Prasarana Publik melalui Bidang Bina Marga , Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Penataan ruang dan Jasa Konstruksi dan Bagian Sekretariat. Dalam menjalankan peran strategisnya ini SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disingkat Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKDP disusun berpedoman pada



RPJMD, dalam hal ini adalah RPJMD tahun 2021-2026 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Renstra SKPD memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan RPJMD dimana komponen-komponen dalam RPJMD mempedomani rumusan komponen-komponen di dalam Renstra SKPD.

Untuk hirarki di bawahnya Renstra SKPD akan mempedomani Renja-SKPD dimana Renja SKPD akan mengadopsi komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra SKPD yaitu isu strategis, visi, misi, strategi, arah kebijakan serta tujuan dan sasaran. Kegiatan-kegiatan pada Renja SKPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.



8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2020-2024.
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 27 Tahun 2020 Tentang rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2005-2025
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2013-2033
16. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2005-2025

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026:

1. Memberikan gambaran tentang kondisi infrastruktur dasar, sarana dan prasarana publik di bidang ke-PU-an.
2. Sebagai acuan bagi aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Sebagai acuan dalam mengukur kinerja dan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 adalah:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2016-2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 disusun menurut sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- B. Sumber Daya Perangkat Daerah
- C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah



- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- B. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 adalah:

Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan Administrasi dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi, dan.





5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Terkait tugas dan fungsinya.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.





- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan





sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;

- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, falisitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;





- e. Pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana keciptaan karya.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.





6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.





Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat :

- a. Sub. Bagian Umum dan Keuangan
- b. Sub. Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan program

3. Bidang Sumber Daya Air:

- a. Seksi Bina Irigasi dan Rawa
- b. Seksi Saluran Sungai dan Drainase Primer
- c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan

4. Bidang Bina Marga

- a. Seksi Peralatan dan laboratorium
- b. Seksi Jalan dan jembatan
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

5. Bidang Cipta Karya

- a. Seksi perencanaan dan pengendalian Bidang Cipta Karya.
- b. Seksi pengembangan air minum
- c. Seksi Penyehatan lingkungan, permukiman dan tata bangunan.

6. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi





- a. Seksi Pembinaan Tata Ruang
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang
- c. Seksi pembinaan jasa konstruksi

2.2. Sumber Daya SKPD

Komposisi dan Tingkat Pendidikan Aparatur

1. Jumlah aparatur Dinas Pekerjaan Umum ada 110 orang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 50 orang
- Pegawai TKS/TKK (honorar) sebanyak: 60 orang

Adapun kebutuhan ideal pejabat struktural adalah:

1. Pejabat eselon 2 : 1 Orang
2. Pejabat Eselon 3 : 5 Orang
3. Pejabat Eselon 4 : 14 Orang.
4. Apa bila 1 Pejabat eselon 4 memiliki 2 orang staf, maka kebutuhan staf 28 orang.

5. Jabatan fungsional Bendahara 1 orang

Maka kebutuhan Jumlah ASN yang ideal sebanyak 50 orang.

6. Pendidikan terakhir aparatur

- a. Strata 2 (dua) sebanyak : 3 orang





- b. Strata 1 (satu) sebanyak : 20 orang
 - c. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
 - d. SMA sederajat sebanyak : 23 orang
7. Pendidikan terakhir honorer
- a. Strata 1 (satu) sebanyak : 18 orang
 - b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 4 orang
 - c. SMA sederajat sebanyak : 50 orang

Kondisi Aset

Untuk menunjang operasional pelaksanaan program dan kegiatan akumulasi nilai aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut.

| No. | URAIAN | NILAI (Rp) |
|-----|-------------------------------|------------------------|
| A | ASET LANCAR (Persediaan) | 6.748.160,00,- |
| B | ASET TETAP | 3.546.329.797.839,64,- |
| 1. | Tanah | 17.736.739.558,17,- |
| 2. | Peralatan dan Mesin | 8.3963049.777.17,- |
| 3. | Gedung dan Bangunan | 110.393.560.612,83,- |
| 4. | Jalan, Jaringan dan Instalasi | 3.176.367.268.491,31,- |
| 5. | Aset Tetap Lainnya | 2.200.820.500,00,- |
| 6. | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 231.235.358.900,17,- |
| C | ASET LAINNYA | 14.864.001.096,68,- |
| D | BMD Ekstrakompatibel | 475.250,00,- |

Sumber : Laporan Keuangan DPUPR Tahun 2020



2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama periode RPJMD 2021 – 2025 serta tertuang didalam Rentstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Sasaran :

- a. Tersedianya Sumber Daya Air yang mampu mendukung produktifitas peretanian dan perkenbunan yang mendukung perkembangan ekonomi daerah.
- b. Terpenuhinya pelayanan dasar bagi masyarakat.
- c. Terwujudnya konektifitas dalam daerah dan antar lintas kabupaten.

Adapun Anggaran dan realisasi Anggaran periode Tahun 2016 – 2020 berdasarkan alokasi dan realisasi berdasarkan indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 2.1. sebagai berikut :





TABEL 2.1
REKAPITULASI ANGGARAN DAN REALISASI
BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG tahun 2016 - 2020

| No | INDIKATOR KINERJA | URAIAN PROGRAM | ANGGARAN | | BOBOT ANGGARAN | | |
|----|--|----------------|---|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| | | | ALOKASI | REALISASI | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | |
| 1 | Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik dan Sedang | 1 | Pembangunan Jalan dan Jembatan | 634.305.543.202 | 602.738.662.092 | | |
| | | 2 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan | 3.738.100.000 | 3.425.521.581 | | |
| 2 | Panjang Jalan Konektifitas Yang Terbangun | 3 | Peningkatan Jalan dan Penggatian Jembatan | 49.880.000.000 | 44.402.979.637 | | |
| | | 4 | Pembangunan Infrastrukt Perkotaan dan Perdesaan | 37.612.349.606 | 37.103.039.275 | | |
| | | 5 | Transportasi Perdesaan | 213.732.000 | 6.000.000 | | |
| | | 6 | Pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan | 308.642.092.098 | 285.663.427.892 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 1 DAN 2 | 1.034.391.816.906 | 973.339.630.476 | 64,26791923 | 60,8892 |
| | Persentase Kecamatan Yang Mendapatkan | 7 | Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih | 3.933.560.000 | 3.815.661.100 | | |
| | | 8 | Penyediaan dan Pengolahan Air | 1.750.250.000 | 1.543.588.210 | | |



| | | | | | | | |
|---|---|----|---|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Aksesibilitas dan Layanan Air Bersih | | Baku | | | | |
| | | 9 | Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | 138.093.844.000 | 133.245.441.816 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 3 | 143.777.654.000 | 138.604.691.126 | 8,9330 66275 | 8,670 693 |
| 4 | Berkurangnya Luasan Genangan di Perkotaan | 10 | Pembangunan Prasarana Sanitasi | 6.556.114 | 6.556.114 | | |
| | | 11 | Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh | 295.091.000 | 245.192.415 | | |
| | | 12 | Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong gorong | 21.568.119.789 | 21.028.722.270 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 4 | 21.869.766.903 | 21.280.470.799 | 1,3587 93051 | 1,331 242 |
| 5 | Persentase Rekomendasi IMB di Patuhi | 13 | Pengendalian dan pemanfaatan ruang | 443.820.000 | 161.287.245 | | |
| | | 14 | Pengembangan Perumahan | 174.825.000 | 111.420.000 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 5 | 618.645.000 | 272.707.245 | | |
| 6 | Jumlah Kecamatan teraliri air irigasi | 15 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | 92.085.406.579 | 87.320.561.333 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 6 | 92.085.406.579 | 87.320.561.333 | 5,7213 69191 | 5,462 512 |
| 7 | Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang | 16 | Perencanaan Tata Ruang | 6.377.720.000 | 5.917.586.312 | | |



| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| | | 1 7 | Pemanfaatan Ruang | 871.795.000 | 473.390.000 | | |
| | | 1 8 | Pengembangan Data dan Informasi | 296.350.000 | 280.075.000 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 7 | 7.545.865.000 | 6.671.051.312 | 0,4688 33023 | 0,417 321 |
| 8 | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi | 1 9 | Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | 1.131.560.000 | 819.570.100 | | |
| | | | PENDANAAN INDIKATOR 8 | 1.131.560.000 | 819.570.100 | 0,0703 05087 | 0,051 27 |
| | | | | - | - | | |
| | | | | - | - | | |
| | | | JUMLAH | 1.301.420.714.3 88 | 1.228.308.682.39 1 | | |
| | | | | - | - | | |
| | | 2 0 | Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.944.245.875 | 6.262.266.217 | | |
| | | 2 1 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 235.477.128.264 | 230.053.955.789 | | |
| | | 2 2 | Peningkatan Disiplin Aparatur | 405.845.000 | 387.994.000 | | |
| | | 2 3 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 77.000.000 | 10.000.000 | | |
| | | 2 4 | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 638.825.000 | 476.435.000 | | |



| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|------------------------|--------|-------|
| | | Peningkatan Sarana Kesehatan | 24.690.350.000 | 23.355.440.000 | | |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | 2.536.150.000 | 2.480.658.000 | | |
| | | Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya | 36.309.207.600 | 35.656.806.054 | | |
| | | JUMLAH LAIN LAIN | 308.078.751.739 | 298.683.555.060 | 19,141 | 27704 |
| | | TOTAL PENDANAAN | 1.609.499.466.127 | 1.598.542.202.786 | | |

Dari Tabel 2.1 diatas terlihat alokasi anggaran untuk indikator kinerja utama selama periode Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

| No | IKU | Alokasi Anggaran | Realisasi Anggaran | Persentase |
|----|--|---------------------|--------------------|------------|
| 1. | Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi Manataf | 1.014.391.855.000,- | 973.339.630.476,- | 65,26 |
| 2 | Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum | 143.777.654.000,- | 138.604.691.126,- | 8,93 |



| | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------|
| 3 | Persentase luasan lahan pertanian yang teraliri air | 92.085.406.579,- | 87.320.561.333,- | 5,71 |
| 4 | Berkurangnya luas genangan di perkotaan | 21.869.766.903,- | 21.280.470.799,- | 1,35 |
| 5 | Persentase kesesuaian ruang | 7.545.865.000,- | 6.671.051.312,- | 0,46 |

Disamping alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran kinerja utama diatas terdapat alokasi anggaran tetapi tidak merupakan target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat berkisar Rp. 308.078.751.- dengan realisasi sebesar Rp. 298.683.555.060,- atau sekitar 19,14 %.

Dari alokasi anggaran periode Tahun 2016 – 2021 diatas pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada akhir periode RPJMD Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagai berikut :



Tabel 2.2 Capaian Kinerja OPD pada akhir period RPJMD

| No | Indikator Kinerja Utama | Target Akhir RPJMD | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|---|--------------------|-----------|-----------------|
| 1 | Persentase Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik dan sedang | 58,00% | 56,70% | 97,76% |
| 2 | Berkurangnya luas genangan di perkotaan | 90,00% | 73,00% | 81,11% |
| 3 | Persentase kecamatan mempunyai akses layanan air minum | 95,00% | 84,61% | 89,06% |
| 4 | Prsentase Kesesuaian Ruang | 80,00% | 78,00% | 97,05% |
| 5 | Persentase Luasan Lahan Pertanian yang teraliri air irigasi | 65,00% | 60,00% | 92,31% |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa upaya pencapaian sasaran kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama berada pada capaian diatas 75 persen. Sementara itu apabila diamati dari Tabel 2.1 terdapat alokasi anggaran yang diperuntukan untuk Kegiatan yang tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidak berhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mampu mencapai kinerja yang sudah ditetapkan.





BAB III

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki beberapa permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bidang Bina Marga

1. Sebagian Wilayah pengembangan berada di wilayah pesisir yang berawa dan bergambut yang menyebabkan permasalahan pada daya dukung tanah dasar.
2. Untuk konektifitas antar wilayah memerlukan biaya yang besar karena memiliki banyak parit.
3. Sebagian wilayah terletak jauh dari Quarry atau material.
4. Alat Berat yang dimiliki umurnya sudah relatif tua sehingga sudah diperlukan peremajaan.
5. Belum dimilikinya Laboratorium Pengujian.

b. Bidang Cipta Karya

1. Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih relatif rendah.





2. Cakupan layanan sanitasi masih rendah.
3. Masih banyak terdapat bangunan yang belum memiliki IMB.
4. Infrastruktur Sarana dan Prasarana Ekonomi, Sosial dan Budaya Belum Memadai.

c. Bidang Sumber Daya Air

1. Aliran Air Irigasi belum maksimal mendukung peningkatan potensi pertanian.
2. Pengembangan dan pemeliharaan Daerah Rawa akan mempengaruhi perkebunan masyarakat serta lalu lintas air.
3. Pengelolaan Air Baku dan Sungai belum optimal dilakukan.

d. Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

1. Belum adanya Perda RDTR sebagai turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Belum terlaksananya pengendalian pemanfaatan tata ruang secara optimal.
3. Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi belum dapat dilakukan dengan optimal.
4. Kurangnya tenaga terampil yang memiliki sertifikasi.





3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu visi “MENUJU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH” *(Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman dan Harmonis)* “ sementara untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berilmu, dan berahlak.
2. Cipta kondisi sosial yang tentram, tertib, dan harmonis
3. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik
4. Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan
5. Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota

Berdasarkan visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021-2026, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan program-program untuk mewujudkan misi keempat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu: ***Peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.***

Dan misi kelima yaitu : ***Pemerataan pembangunan daerah dari desa sampai ke kota***





Program-program Dinas Pekerjaan Umum adalah:

1. Urusan Wajib Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
3. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
6. Program Pengembangan Permukiman.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

3.2.1 Faktor-faktor Penghambat Pelayanan SKPD antara lain adalah:

Berkaitan dengan program-program di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki faktor-faktor penghambat antara lain adalah:

1. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas.
2. Pelaksanaan administrasi perkantoran belum optimal
3. Peralatan kerja masih kurang.
4. Belum tersedianya unit sebagai pelaksanan pengujian bahan dan kualitas pekerjaan.





5. Pembinaan pelaksana penyedia barang dan jasa belum optimal.
6. Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat.

3.2.2 Faktor-faktor pendorong pelayanan SKPD antara lain adalah:

1. Pemilihan program sesuai skala prioritas dan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat serta alokasi dana yang tersedia.
2. Usaha peningkatan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia baik di dalam organisasi maupun secara lintas sektoral untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan penerapan prinsip clean and good governance.
3. Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan berwawasan lingkungan.
4. Perlunya kesabaran masyarakat menanti hasil-hasil pembangunan mengingat terbatasnya kemampuan pendanaan.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian PU Pera dan Renstra Provinsi

Menelaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2015-2020, menyebutkan bahwa arah kebijakan Pembangunan Infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah untuk mewujudkan infrastruktur pekerjaan umum yang handal dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antar daerah, antar sektor, antar tingkat pemerintahan yang didukung industri konstruksi





nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

Selanjutnya Strategi yang dilaksanakan adalah:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan antar daerah terutama di kawasan tertinggal, dan kawasan perdesaan.
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis dalam rangka kemandirian.
3. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk konektivitas guna meningkatkan efisiensi dan pelayanan sistem logistik bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan, konektivitas daratan dan maritim.
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan pekerjaan umum maka faktor-faktor penghambat dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD jika ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L antara lain adalah:

1. Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin





2. Masih kurangnya efisiensi, efektivitas, produktivitas dan dukungan secara optimal oleh jajaran birokrasi serta belum mengedepankan transparansi dan akuntabilitas birokrasi.
3. Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan.

Sedangkan faktor-faktor pendorongnya antara lain adalah:

1. Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme jajaran birokrasi.
2. Tersedianya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur
3. Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pusat perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan, dan pertambangan yang berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi: **a. perwujudan pembangunan yang merata dan berimbang dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; b. pemantapan sistem**





perekonomian perkotaan yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa; c. **perwujudan sistem perkotaan dan pusat distribusi yang mampu memacu pertumbuhan wilayah**; d. perwujudan pertanian untuk mendukung pengembangan perekonomian kabupaten; e. pengembangan dan pemanfaatan potensi perikanan secara optimal; f. perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; g. **perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten**; h. peningkatan dan pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; i. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; dan j. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

| No | Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|-----|---|--|---|--|
| | | | Penghambat | Pendorong |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Menyiapkan dukungan prasarana dan sarana yang memadai dalam mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan | <ul style="list-style-type: none">- Peningkatan konektivitas dan kondisi pelayanan jaringan jalan Kabupaten.- Cakupan layanan air minum SPAM perpipaan masih rendah.- Cakupan Layanan Sanitasi Masih Rendah. | Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia ASN terbatas | Kesadaran untuk meningkatkan profesionalisme jajaran birokrasi |
| 2 | mengembangkan sistem irigasi yang menjamin tersediannya air sepanjang tahun, terutama untuk mengairi pertanian lahan basah. | Pekerjaan Bidang Sumber Daya Air hampir semua tergantung dengan kondisi muka air seperti pekerjaan saluran irigasi, rawa, dan tanggul. Akibatnya saluran irigasi, rawa dan tanggul cepat mengalami kerusakan. | Fenomena perubahan iklim yang tidak menentu akibat dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan pembangunan terkait dengan dukungan infrastruktur PU untuk menyokong produksi pangan. | Semakin meningkatnya kesadaran ekologi dipacu keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan yang bila tidak ditangani dapat memberi dampak buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat baik di masa sekarang ataupun mendatang |





| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 3. | memantapkan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan memantapkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dengan penyediaan sarana dan prasarana wilayah | Belum adanya turunan dari Peraturan Daerah Tentang RTRW Kabupaten Tanjung Jabung Barat. | Kurangnya Sosialisasi tata ruang di tengah masyarakat. | Meningkatnya kesadaran untuk melakukan pembangunan dengan mentaati tata ruang. |
| 4. | mendorong perkembangan kawasan agar lebih mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah terutama dalam membuka daerah yang terisolir dan mencukupi kebutuhan wilayah yang bertetangga | Kondisi lahan yang berawa dan bergambut membutuhkan biaya yang mahal untuk pembangunan jalan dan jembatan. | Kesenjangan antar wilayah dan ketersediaan infrastruktur yang belum merata ke semua golongan masyarakat terutama masyarakat miskin | Tersedianya dana untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur |

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan penelaahan terhadap faktor-faktor pendorong dan faktor penghambat pelayanan SKPD maka isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan ruas jalan tol Jambi – Rengat melewati wilayah Kab. Tanjung Jabung Barat pada 4 kecamatan, yaitu Kec. Muara Papalik (Desa Dusun Mudo), Kec. Tungkal Ulu (Kuala Dasal, Kel. Pelabuhan Dagang, desa Brasau, dan Desa Taman Raja), Kec. Tebing Tinggi (Kel. Tebing Tinggi), dan Kec. Batang Asam (desa Suban). Dengan Interchange berada di Dusun Mundo Kecamatan Muara Papalik Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kemudian rest area salah satunya terdapat di Desa Brasau dan Desa Taman Raja Kecamatan Tungkal Ulu. Keberadaan ruas jalan tol Jambi – Rengat yang melewati 4 kecamatan dalam Kab. Tanjung Jabung Barat akan memberikan dampak sosial





ekonomi terhadap daerah, dampak positif bisa berupa peningkatan perekonomian masyarakat sekitar khususnya dan bagi Kab.Tanjung Jabung Barat.

2. Infrastruktur pelayanan dasar belum memadai dan merata, sehingga menjadi penghambat konektivitas antar wilayah.
3. Kemantapan jalan kabupaten yang masih rendah.
4. Masih banyak terdapat idle capacity dari Cakupan pelayanan air minum.
5. Cakupan pelayanan sanitasi masih rendah untuk mendukung standar pelayanan minimal kabupaten.
6. Peningkatan infrastruktur pengelolaan Sumber daya air untuk pelayanan irigasi baik irigasi teknis maupun irigasi rawa yang sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu food estate dan peningkatan produksi pertanian.





Tujuan dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
2. Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam





kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya jalan kabupaten yang mantap
2. Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat
3. Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari
4. Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat.

a. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan, dan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas.
2. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
3. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:





1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP, dan Menyusun rencana ketersediaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat
2. Menyusun rencana kegiatan TURBINLAKWAS Tata Ruang.
3. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal.

Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 4.1** berikut :





**RENSTRA DINAS PUPR KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT 2021 - 2026**

Tabel : 4.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021) | Target Kinerja pada Tahun Ke- | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|-----|---|--|---|--------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan | Tersedianya jalan kabupaten yang mantap | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 33% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 53% |
| 2 | | Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat | Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 63,11% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 81% |
| 3 | | Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari | Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | % | 70,84% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 87% |
| 4 | | Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat | persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten | % | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |





STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan,
2. Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas.
3. Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air minum perpipaan dan non perpipaan.
4. Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna

Kebijakan yang dipergunakan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah
2. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat.





3. Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP.
4. Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal





Selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel No. 5.1** berikut :

Tabel : 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|---|--|--|--|
| Terwujudnya sarana transportasi untuk mendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan prasarana penunjang pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan | Tersedianya jalan kabupaten yang mantap | Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan jembatan, | Menyusun rencana penanganan Jalan dan jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah. |
| | Terjaminnya layanan pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat | Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana sanitasi berbasis masyarakat yang berkualitas | Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPALD-T dan SPALD-S yang aman bagi masyarakat |
| | Tersedianya air minum yang layak bagi kebutuhan masyarakat sehari-hari | Merencanakan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air minum perpipaan dan non perpipaan. | Menyusun rencana revitalisasi, Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan SPAM dan SPAM BJP |
| Terwujudnya peningkatan produktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat | Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian dan perkebunan rakyat | Merencanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna | Menyusun rencana. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk mencapai hasil pertanian yang optimal |



BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi organisasi, dengan demikian kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Adapun program dan kegiatan utama yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2021-2026 yaitu:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah





- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.





4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota.

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

- Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Pengembangan Permukiman

- Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

8. Program Penataan Bangunan Gedung

- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota





10. Program Penyelenggaraan Jalan

- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
- Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

Untuk lebih rincinya Rencana program prioritas, Indikator Kinerja dan kebutuhan pendanaan dapat dilihat pada **tabel-6.1 terlampir**.





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Untuk melakukan pengukuran kinerja telah digunakan indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator kinerja pada tingkat tujuan dan sasaran yang merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sasaran tersebut agar dapat dicapai.
- Indikator kinerja pada tingkat kegiatan yang terdiri atas :
 - a. Indikator Input (masukkan) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan agar dapat menghasilkan output (keluaran)
 - b. Indikator output (keluaran) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik ataupun non fisik
 - c. Indikator outcome (hasil) yaitu sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada waktu tertentu secara langsung
 - d. Indikator benefit (manfaat) yaitu yang terkait dengan tujuan akhir dari suatu kegiatan
 - e. Indikator impact (dampak) yaitu pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja Program yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

1. Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap.
2. Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
3. Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
4. Persentase kesesuaian ruang.



5. persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten.

Untuk lebih rincinya indikator indikator diatas dapat dilihat pada Tabel-7.1 berikut ini :



Tabel : 7.1
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2021) | Target Kinerja pada Tahun Ke- | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) |
|----------|---|--------|--|-------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | |
| 1 | Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 33% | 43% | 45% | 47% | 49% | 51% | 53% | 53% |
| 2 | Persentase penduduk yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | % | 63,11% | 66% | 69% | 72% | 75% | 78% | 81% | 81% |
| 3 | Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari | % | 70,84% | 72% | 75% | 78% | 81% | 84% | 87% | 87% |
| 4 | Persentase panjang bangunan pengaman pantai/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten | % | 40% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |

TABEL 6.1 MATRIK KEGIATAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2021-2026

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung-jawab | | | |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|---|------------|------------------|---------------|----------------|--|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp | |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp | |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | | |
| | | | X | XX | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA | | | | 12 bulan | 32,969,844,084 | 12 bulan | 24,210,028,435 | 12 bulan | 22,890,150,696 | 12 bulan | 21,763,262,666 | 12 bulan | 22,211,894,840 | 12 bulan | 124,045,180,721 | SEKRETAR IAT | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.01 | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 12 bulan | 688,000,000 | 12 bulan | 687,000,000 | 12 bulan | 565,000,000 | 12 bulan | 580,000,000 | 12 bulan | 595,000,000 | 12 bulan | 3,115,000,000 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.01 | 01 | Perencanaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | 8 dokumen | 200,000,000 | 8 dokumen | 200,000,000 | 8 dokumen | 200,000,000 | 8 dokumen | 200,000,000 | 8 dokumen | 200,000,000 | 8 dokumen | 48 dokumen | 1,000,000,000 | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.01 | 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | 5 dokumen | 200,000,000 | 5 dokumen | 200,000,000 | 5 dokumen | 160,000,000 | 5 dokumen | 170,000,000 | 5 dokumen | 180,000,000 | 5 dokumen | 25 Dokumen | 910,000,000 | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | 12 Laporan | 148,000,000 | 12 Laporan | 145,000,000 | 12 Laporan | 105,000,000 | 12 Laporan | 110,000,000 | 12 Laporan | 115,000,000 | 12 Laporan | 60 Laporan | 623,000,000 | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | 5 Laporan | 140,000,000 | 5 Laporan | 142,000,000 | 5 Laporan | 100,000,000 | 5 Laporan | 100,000,000 | 5 Laporan | 100,000,000 | 5 Laporan | 25 Laporan | 582,000,000 | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | 12 bulan | 12,975,000 | 12 bulan | 6,988,844,084 | 12 bulan | 7,184,558,435 | 12 bulan | 7,382,120,196 | 12 bulan | 7,605,779,551 | 12 bulan | 7,825,718,051 | 12 bulan | 36,987,020,316 | |
| | | | X | XX | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | 53 orang/bulan | 5,304,395,263 | 53 orang/bulan | 5,728,746,884 | 53 orang | 5,900,609,291 | 55 orang | 6,077,627,569 | 57 orang | 6,259,956,396 | 59 orang | 6,447,755,068 | 330 orang | 30,414,695,228 | |
| | | | X | XX | 01 | 2.02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | | 12 Dokumen | 911,860,000 | 12 Dokumen | 930,097,200 | 12 Dokumen | 948,699,144 | 12 Dokumen | 967,673,127 | 12 Dokumen | 987,026,589 | 12 Dokumen | 1,006,767,121 | 72 Dokumen | 4,840,263,182 | |
| | | | X | XX | 01 | 2.02 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 3 laporan | 34,850,000 | 3 laporan | 150,000,000 | 3 laporan | 151,200,000 | 3 laporan | 157,248,000 | 3 laporan | 163,537,920 | 3 laporan | 170,079,437 | 18 laporan | 792,065,357 | |
| | | | X | XX | 01 | 02.02 | 06 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan | | | 10 Dokumen | 35,000,000 | 10 Dokumen | 35,000,000 | 10 Dokumen | 36,050,000 | 10 Dokumen | 37,131,500 | 10 Dokumen | 38,245,445 | 10 Dokumen | 39,392,806 | 60 Dokumen | 185,819,753 | |
| | | | X | XX | 01 | 02.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | | | 16 laporan | 145,000,000 | 16 laporan | 145,000,000 | 16 laporan | 148,000,000 | 16 laporan | 152,440,000 | 16 laporan | 157,013,200 | 16 laporan | 161,723,596 | 96 Laporan | 764,176,796 | |
| | | | X | XX | 01 | 02.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | 12 Laporan | 325,200,000 | 12 Laporan | 331,700,000 | 12 Laporan | 341,651,000 | 12 Laporan | 351,900,530 | 12 Laporan | 362,457,546 | 60 Laporan | 1,712,909,076 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.03 | 01 | Perencanaan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | 1 Dokumen | 51,500,000 | 1 Dokumen | 53,045,000 | 1 Dokumen | 54,636,350 | 1 Dokumen | 56,275,441 | 1 Dokumen | 58,000,000 | 5 Dokumen | 265,456,791 | |
| | | | X | XX | 01 | 02.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | 20 Dokumen | 80,000,000 | 20 Dokumen | 82,400,000 | 20 Dokumen | 84,872,000 | 20 Dokumen | 87,418,160 | 20 Dokumen | 90,040,705 | 20 Dokumen | 92,750,000 | 20 Dokumen | 424,730,865 | |
| | | | X | XX | 01 | 02.03 | 05 | Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 12 laporan | 50,000,000 | 12 laporan | 51,500,000 | 12 laporan | 53,045,000 | 12 laporan | 54,636,350 | 12 laporan | 56,275,441 | 60 laporan | 265,456,791 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | 2 Laporan | 145,200,000 | 2 Laporan | 146,300,000 | 2 Laporan | 150,689,000 | 2 Laporan | 155,209,670 | 2 Laporan | 159,865,960 | 10 Laporan | 757,264,630 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.04 | | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | | | | 1 Laporan | 140,000,000,000 | 1 Laporan | 142,000,000,000 | 1 Laporan | 146,260,000,000 | 1 Laporan | 150,647,800,000 | 1 Laporan | 155,167,234,000 | 5 Laporan | 734,075,034,000 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.04 | 07 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | 1 Laporan | 140,000,000,000 | 1 Laporan | 142,000,000,000 | 1 Laporan | 146,260,000,000 | 1 Laporan | 150,647,800,000 | 1 Laporan | 155,167,234,000 | 5 Laporan | 734,075,034,000 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | 12 bulan | 486,000,000 | 12 bulan | 541,200,000 | 12 bulan | 557,436,000 | 12 bulan | 574,159,080 | 12 bulan | 591,383,852 | 12 bulan | 2,750,176,932 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | 01 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai | | | 1 unit | 10,000,000 | 1 unit | 10,300,000 | 1 unit | 10,609,000 | 1 unit | 10,927,270 | 1 unit | 11,255,086 | 5 unit | 53,091,358 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | | 274 Stel | 230,000,000 | 274 Stel | 250,000,000 | 274 Stel | 257,500,000 | 274 Stel | 265,225,000 | 274 Stel | 273,181,750 | 1370 stel | 1,275,906,750 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | 03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | 12 Dokumen | 30,000,000 | 12 Dokumen | 30,900,000 | 12 Dokumen | 31,827,000 | 12 Dokumen | 32,781,810 | 12 Dokumen | 33,765,264 | 60 Dokumen | 159,274,074 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | 05 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | | | 1 dokumen | 146,000,000 | 1 dokumen | 150,000,000 | 1 dokumen | 154,500,000 | 1 dokumen | 159,135,000 | 1 dokumen | 163,909,050 | 5 dokumen | 773,544,050 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | | 10 orang | 70,000,000,000 | 10 orang | 100,000,000 | 10 orang | 103,000,000 | 10 orang | 106,090,000 | 10 orang | 109,272,700 | 50 orang | 488,362,700 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung jawab | | |
|--|--|---|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--|---|---------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|---|---------------|------------------|------------------------|------|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| | | | | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | | -19- | -18- |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12 bulan | 1,158,000,000 | 12 bulan | 1,177,650,000 | 12 bulan | 1,222,849,500 | 12 bulan | 1,270,677,585 | 12 bulan | 1,321,387,371 | 12 bulan | 6,150,564,456 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100 Paket | 86,000,000 | 100 Paket | 86,950,000 | 100 Paket | 89,558,500 | 100 Paket | 92,245,255 | 100 Paket | 95,012,613 | 500 Paket | 449,766,368 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 50 Paket | 50,000,000 | 50 Paket | 57,500,000 | 50 Paket | 66,125,000 | 50 Paket | 76,043,750 | 50 Paket | 87,450,313 | 250 Paket | 337,119,063 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 110,000,000 | 12 Paket | 113,300,000 | 12 Paket | 116,699,000 | 12 Paket | 120,199,970 | 12 Paket | 123,805,969 | 60 Paket | 584,004,939 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 30,000,000 | 12 Paket | 30,900,000 | 12 Paket | 31,827,000 | 12 Paket | 32,781,810 | 12 Paket | 33,765,264 | 60 Paket | 159,274,074 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 5 Dokumen | 27,000,000 | 5 Dokumen | 29,600,000 | 5 Dokumen | 30,488,000 | 5 Dokumen | 31,402,640 | 5 Dokumen | 32,344,719 | 25 Dokumen | 150,835,359 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 800,000,000 | 12 Laporan | 800,000,000 | 12 Laporan | 824,000,000 | 12 Laporan | 848,720,000 | 12 Laporan | 874,181,600 | 60 Laporan | 4,146,901,600 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.06 | 10 | Penatuaan Arsip Dinamis Pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatuaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 Dokumen | 55,000,000 | 12 Dokumen | 59,400,000 | 12 Dokumen | 64,152,000 | 12 Dokumen | 69,284,160 | 12 Dokumen | 74,826,893 | 60 Dokumen | 322,663,053 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan BMD penunjang urusan SKPD | 27 unit | 13,830,000,000 | 32 unit | 12,005,900,000 | 21 unit | 10,421,877,000 | 19 unit | 8,879,145,310 | 19 unit | 8,896,519,669 | 118 unit | 54,033,441,979 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | 2 unit | 1,100,000,000 | 2 unit | 1,320,000,000 | 2 unit | 1,359,600,000 | | | | | 6 unit | 3,779,600,000 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 4 Unit | 2,200,000,000 | 10 Unit | 2,640,000,000 | 2 Unit | 1,000,000,000 | 2 unit | 800,000,000 | 2 unit | 800,000,000 | 20 unit | 7,440,000,000 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | 03 | Pengadaan alat besar | Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan | 2 Unit | 10,000,000,000 | 5 unit | 7,500,000,000 | 2 unit | 7,500,000,000 | 2 unit | 7,500,000,000 | 2 unit | 7,500,000,000 | 12 unit | 40,000,000,000 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | 05 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 10 unit | 30,000,000 | 5 unit | 30,900,000 | 5 unit | 31,827,000 | 5 unit | 32,781,810 | 5 unit | 33,765,264 | 30 unit | 159,274,074 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.07 | 06 | Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 20 unit | 500,000,000 | 10 unit | 515,000,000 | 10 unit | 530,450,000 | 10 unit | 546,363,500 | 10 unit | 562,754,405 | 50 unit | 2,654,567,905 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 7,543,800,000 | 12 Bulan | 237,080,000 | 12 Bulan | 244,870,000 | 12 Bulan | 252,961,460 | 12 Bulan | 261,370,200 | 12 Bulan | 8,540,081,660 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 20 Laporan | 8,800,000 | 20 Laporan | 9,680,000 | 20 Laporan | 10,648,000 | 20 Laporan | 11,712,800 | 20 Laporan | 12,884,060 | 100 Laporan | 53,724,880 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 241,400,000 | 12 Laporan | 7,500,000,000 | 12 Laporan | 185,400,000 | 12 Laporan | 190,962,000 | 12 Laporan | 196,690,860 | 12 Laporan | 202,591,586 | 60 Laporan | 8,275,644,446 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.08 | 03 | Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor | 34,571,702 | 12 Laporan | 35,000,000 | 12 Laporan | 42,000,000 | 12 Laporan | 43,260,000 | 12 Laporan | 44,557,800 | 12 Laporan | 45,894,534 | 60 Laporan | 210,712,334 | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang pemeliharaan yang di pelihara | 72 unit | 1,238,196,100 | 69 Unit | 1,810,000,000 | 69 Unit | 1,902,940,000 | 69 Unit | 1,998,087,000 | 69 Unit | 2,097,991,350 | 69 Unit | 2,202,890,918 | 412 Unit | 10,011,909,268 | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 5 unit | 399,050,000 | 5 unit | 400,000,000 | 5 unit | 441,000,000 | 5 unit | 463,050,000 | 5 unit | 486,202,500 | 30 unit | 2,210,252,500 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 5 unit | 300,944,800 | 5 unit | 310,000,000 | 5 unit | 341,775,000 | 5 unit | 358,863,750 | 5 unit | 376,806,938 | 30 unit | 1,712,945,888 | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 03 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar | Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya | 5 unit | 460,000,000 | 5 unit | 520,000,000 | 5 unit | 548,440,000 | 5 unit | 575,862,000 | 5 unit | 604,655,100 | 5 unit | 634,887,855 | 30 unit | 2,883,844,955 | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah mebel yang di pelihara | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 57 unit | 78,201,300 | 57 unit | 80,000,000 | 57 unit | 84,000,000 | 57 unit | 88,200,000 | 57 unit | 92,610,000 | 57 unit | 97,240,500 | 342 unit | 442,050,500 | | |
| | | | X | XX | 01 | 02.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 2 unit | 500,000,000 | 2 unit | 525,000,000 | 2 unit | 551,250,000 | 2 unit | 578,812,500 | 2 unit | 607,753,125 | 10 unit | 2,762,815,625 | | | | |
| terjaminnya aliran air irigasi pertanian/pekerjaan publik dan masyarakat | peningkatan kualitas sumber daya air di wilayah sungai dan irigasi | terlaksananya pengelolaan sumber daya air dalam wilayah kabupaten | 1 | 03 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) | persentase panjang bangunan pengaman panta/sungai dan jaringan irigasi yang terbangun di wilayah kabupaten | 45% | | 50% | 74,950,000,000 | 55% | 131,339,000,000 | 60% | 147,386,900,000 | 65% | 132,279,590,000 | 70% | 133,911,549,000 | 70% | 619,867,039,000 | BIDANG SUMBER DAYA AIR | |
| | | | 1 | 03 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persentase Bangunan pengaman panta/sungai yang terbangun di wilayah sungai kabupaten | 45% | | 50% | 32,060,000,000 | 55% | 86,860,000,000 | 60% | 98,460,000,000 | 65% | 78,460,000,000 | 70% | 74,710,000,000 | 70% | 370,550,000,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (output) dan Kegiatan (outcome) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggungjawab | | |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---|--|--------------|----------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|-----------------|--------------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun | 2 dokumen | 600,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | | | | | | | | | | | 4 dokumen | 1,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 03 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 6 dokumen | 1,200,000,000 | 30 dokumen | 6,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 06 | Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun | | | | | 1 unit | 5,000,000,000 | 1 unit | 3,000,000,000 | | | | | | | 2 Unit | 8,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 09 | Pembangunan Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun | 22,82 km | 20,000,000,000 | 22,82 km | 20,000,000,000 | 22,82 km | 25,000,000,000 | 22,82 km | 25,000,000,000 | 22,82 km | 25,000,000,000 | 22,82 km | 25,000,000,000 | 22,82 km | 25,000,000,000 | 114,1 KM | 115,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 11 | Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun | | | 3 unit | 15,000,000,000 | 3 unit | 15,000,000,000 | 3 unit | 15,000,000,000 | 3 unit | 15,000,000,000 | 3 unit | 15,000,000,000 | 3 unit | 15,000,000,000 | 12 unit | 60,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 18 | Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun | | | 1 km | 20,000,000,000 | 1 km | 20,000,000,000 | | | | | | | | | 1 km | 40,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 21 | Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya | Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi | | | | | | | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 2 unit | 2,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 24 | Rehabilitasi Tanggul Sungai | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 22,82 km | 3,300,000,000 | 114,1 KM | 16,500,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 26 | Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir | Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi | | | | | 1 unit | 500,000,000 | 1 unit | 500,000,000 | 1 unit | 500,000,000 | 1 unit | 500,000,000 | 1 unit | 500,000,000 | 3 unit | 1,500,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 33 | Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi | | | | | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 3,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 46 | Normalisasi/Restorasi Sungai | Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi | 2,2 km | 6,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 2,2 km | 26,000,000,000 | 11 km | 110,000,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 48 | Operasi dan Pemeliharaan Bendungan | Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | | | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 1 unit | 1,000,000,000 | 2 unit | 1,250,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 53 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 2200 m | 660,000,000 | 11 km | 3,300,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 59 | Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya | Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara | | | | | 1000 m | 500,000,000 | 1000 m | 500,000,000 | 1000 m | 500,000,000 | 1000 m | 500,000,000 | 1000 m | 500,000,000 | 1000 m | 1,500,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.01 | 81 | Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 1 Dokumen | 300,000,000 | 5 kegiatan | 1,500,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | persentase jaringan irigasi yang terbangun di wilayah daerah irigasi | | 50% | 42,890,000,000 | 60% | 44,479,000,000 | 70% | 48,926,900,000 | 80% | 53,819,590,000 | 90% | 59,201,549,000 | 90% | 59,201,549,000 | 90% | 59,201,549,000 | 5 kegiatan | 248,317,039,000 | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 01 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa | Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun | 10 dokumen | 1,500,000,000 | 10 dokumen | 1,650,000,000 | 10 dokumen | 1,815,000,000 | 10 dokumen | 1,996,500,000 | 10 dokumen | 1,996,500,000 | 10 dokumen | 2,196,150,000 | 10 dokumen | 2,196,150,000 | 50 Dokumen | 9,157,650,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 08 | Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan | 7000 m | | 1,4 km | 5,000,000,000 | 1,4 km | 5,500,000,000 | 1,4 km | 6,050,000,000 | 1,4 km | 6,655,000,000 | 1,4 km | 7,320,500,000 | 1,4 km | 7,320,500,000 | 7 km | 30,525,500,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 16 | Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi | 30600 m | | 6 km | 27,000,000,000 | 6 km | 27,000,000,000 | 6 km | 29,700,000,000 | 6 km | 32,670,000,000 | 6 km | 35,937,000,000 | 6 km | 35,937,000,000 | 30,6 km | 152,307,000,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 21 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara | 7000 m | | 1,4 km | 1,500,000,000 | 1,4 km | 1,650,000,000 | 1,4 km | 1,815,000,000 | 1,4 km | 1,996,500,000 | 1,4 km | 2,196,150,000 | 1,4 km | 2,196,150,000 | 7 km | 9,157,650,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 23 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa | Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara | 1666 km | | 10 km | 7,500,000,000 | 10 km | 8,250,000,000 | 10 km | 9,075,000,000 | 10 km | 9,982,500,000 | 10 km | 10,980,750,000 | 10 km | 10,980,750,000 | 50 km | 45,788,250,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 27 | Operasional Unit Pengelola Irigasi | Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi | | | 1 unit | 150,000,000 | 1 unit | 165,000,000 | 1 unit | 181,500,000 | 1 unit | 199,650,000 | 1 unit | 219,615,000 | 1 unit | 219,615,000 | 5 Unit | 915,765,000 | | | |
| 1 | 03 | 02 | 2.02 | 29 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa | Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara | 1 Kawasan | 120,000,000 | 1 Kawasan | 132,000,000 | 1 Kawasan | 145,200,000 | 1 Kawasan | 159,720,000 | 1 Kawasan | 175,692,000 | 1 Kawasan | 193,461,000 | 1 Kawasan | 193,461,000 | 5 Kawasan | 732,612,000 | | | |
| 1 | 03 | 03 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | persentase rumah tangga terayani air minum di wilayah kabupaten | 70.84 | 72% | 75% | 46,600,000,000 | 78% | 51,260,000,000 | 85% | 56,386,000,000 | 92% | 62,024,600,000 | 100% | 68,227,060,000 | 100% | 68,227,060,000 | | 284,497,660,000 | BIDANG CIPTA KARYA | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga terayani Sistem pengelolaan air bersih | 52797 | | 2050 | 46,600,000,000 | 2050 | 51,260,000,000 | 2050 | 56,386,000,000 | 2050 | 62,024,600,000 | 2050 | 68,227,060,000 | 2050 | 68,227,060,000 | 63047 | 284,497,660,000 | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung jawab | | |
|--|--|---|--------|---------------|---|--|--|---|--|---|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|----------------|------------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | |
| Tersedianya pelayanan sistem penyediaan air minum yang layak di kabupaten | Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih di wilayah kabupaten | meningkatnya jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih di wilayah kabupaten | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun | 3 dokumen | 600,000,000 | 3 dokumen | 660,000,000 | 3 dokumen | 726,000,000 | 3 dokumen | 798,600,000 | 3 dokumen | 878,460,000 | 15 dokumen | 3,663,060,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM | 3 dokumen | 600,000,000 | 3 dokumen | 660,000,000 | 3 dokumen | 726,000,000 | 3 dokumen | 798,600,000 | 3 dokumen | 878,460,000 | 15 dokumen | 3,663,060,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 03 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan | Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun | 10129 SR | 12,000,000,000 | 100 liter/detik | 13,200,000,000 | 100 liter/detik | 14,520,000,000 | 100 liter/detik | 15,972,000,000 | 100 liter/detik | 17,569,200,000 | 100 liter/detik | 73,261,200,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 04 | Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kotopon Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat | 58 unit | 4,500,000,000 | 2000 SR | 4,950,000,000 | 2000 SR | 5,445,000,000 | 2000 SR | 5,989,500,000 | 2000 SR | 6,588,450,000 | 10000 SR | 27,472,950,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 05 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu | 10 liter/detik | 5,000,000,000 | 10 liter/detik | 5,500,000,000 | 10 liter/detik | 6,050,000,000 | 10 liter/detik | 6,655,000,000 | 10 liter/detik | 7,320,500,000 | 10 liter/detik | 30,525,500,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 06 | Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaan | Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/perdesaan | 58 unit | 22,000,000,000 | 100 unit | 24,200,000,000 | 100 unit | 26,620,000,000 | 100 unit | 29,282,000,000 | 100 unit | 32,210,200,000 | 500 unit | 134,312,200,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 09 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum | Jumlah penyelenggara SPAM yang mengikuti regulasi terkait tarif air minum | 1 Penyelenggara SPAM | 300,000,000 | 1 Penyelenggara SPAM | 330,000,000 | 1 Penyelenggara SPAM | 363,000,000 | 1 Penyelenggara SPAM | 399,300,000 | 1 Penyelenggara SPAM | 439,230,000 | 1 Penyelenggara SPAM | 1,831,530,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 13 | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM | Jumlah unit SPAM yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama | 1 tim | 500,000,000 | 1 tim | 550,000,000 | 3 Unit | 605,000,000 | 3 Unit | 665,500,000 | 3 Unit | 732,050,000 | 15 Unit | 3,052,550,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 15 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan | Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 3 Unit | 1,000,000,000 | 3 Unit | 1,100,000,000 | 3 Unit | 1,210,000,000 | 3 Unit | 1,331,000,000 | 3 Unit | 1,464,100,000 | 15 Unit | 6,105,100,000 | | | | |
| 1 | 03 | 03 | 2.01 | 16 | Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan | Jumlah unit SPAM Berbasis Masyarakat yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan | 3 Unit | 100,000,000 | 3 Unit | 110,000,000 | 3 Unit | 121,000,000 | 3 Unit | 133,100,000 | 3 Unit | 146,410,000 | 15 Unit | 610,510,000 | | | | | | | |
| tercapainya lingkungan yang bersih dan bebas sampah di wilayah kabupaten | manajemen pengelolaan sampah yang berkualitas | tersedianya infrastruktur pengolahan sampah yang berkualitas | 1 | 03 | 04 | | PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL | Persentase Unit pengelolaan persampahan terhadap kebutuhan pengelolaan persampahan di wilayah kabupaten | 7.14% | 15% | 29% | 12,525,000,000 | 50% | 17,400,000,000 | 71% | 20,880,000,000 | 86% | 24,636,000,000 | 100% | 29,503,200,000 | 100% | 99,576,200,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | Tersedia nya unit pengolahan persampahan dalam wilayah kabupaten | 1 unit | 4 unit | 12,525,000,000 | 7 unit | 17,400,000,000 | 10 unit | 20,880,000,000 | 12 unit | 24,636,000,000 | 14 unit | 29,503,200,000 | 14 unit | 99,576,200,000 | | | | |
| meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengolahan air limbah yang layak | menyediakan pengelolaan sistem air limbah yang layak bagi masyarakat | tersedianya sarana dan prasarana pengolahan air limbah yang layak bagi masyarakat | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota yang disusun | 2 dokumen | 800,000,000 | 1 dokumen | 500,000,000 | 1 dokumen | 600,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 6 dokumen | 2,500,000,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi | 1 dokumen | 500,000,000 | 1 dokumen | 600,000,000 | 1 dokumen | 720,000,000 | 1 dokumen | 864,000,000 | 4 dokumen | 2,684,000,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 03 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1 Unit | 1000 rumah tangga | 1,500,000,000 | 1000 rumah tangga | 5,000,000,000 | 1000 rumah tangga | 6,000,000,000 | 1000 rumah tangga | 7,200,000,000 | 1000 rumah tangga | 8,640,000,000 | 5000 Rumah tangga | 28,340,000,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 04 | Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi | 1 unit | 10,000,000,000 | 4 unit | 10,000,000,000 | 7 unit | 12,000,000,000 | 10 unit | 14,400,000,000 | 12 unit | 17,280,000,000 | 14 unit | 63,680,000,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 06 | Penyediaan Sarana Persampahan | Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan | 50 unit | 75,000,000 | 50 unit | 150,000,000 | 50 unit | 180,000,000 | 50 unit | 216,000,000 | 50 unit | 259,200,000 | 250 unit | 880,200,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan | 50 orang | 100,000,000 | 50 orang | 200,000,000 | 50 orang | 240,000,000 | 50 orang | 288,000,000 | 50 orang | 345,600,000 | 250 orang | 1,173,600,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 04 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS | 1 kelompok | 50,000,000 | 1 kelompok | 50,000,000 | 1 kelompok | 60,000,000 | 1 kelompok | 72,000,000 | 1 kelompok | 86,400,000 | 5 kelompok | 318,400,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap pelayanan air limbah yang layak | 63.11% | 66% | 69% | 8,100,000,000 | 69% | 16,250,000,000 | 72% | 17,275,000,000 | 75% | 18,402,500,000 | 78% | 19,642,750,000 | 78% | 79,670,250,000 | | |
| 1 | 03 | 05 | 2.01 | | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rumah tangga yang memiliki pelayanan air limbah yang layak | 52797 | 500 SR | 8,100,000,000 | 500 SR | 16,250,000,000 | 500 SR | 17,275,000,000 | 500 SR | 18,402,500,000 | 500 SR | 19,642,750,000 | 2500 SR | 79,670,250,000 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung-jawab | | |
|--|---|---|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|------------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | 250,000,000 | 1 dokumen | 500,000,000 | 1 dokumen | 550,000,000 | 1 dokumen | 605,000,000 | 1 dokumen | 665,500,000 | 5 dokumen | 2,570,500,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 02 | Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota | Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 1 dokumen | 200,000,000 | 1 dokumen | 500,000,000 | 1 dokumen | 550,000,000 | 1 dokumen | 605,000,000 | 1 dokumen | 665,500,000 | 5 dokumen | 2,520,500,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 03 | Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala kota | Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota | 500 rumah tangga | 7,500,000,000 | 500 rumah tangga | 8,250,000,000 | 500 rumah tangga | 9,075,000,000 | 500 rumah tangga | 9,982,500,000 | 500 rumah tangga | 10,980,750,000 | 2500 rumah tangga | 45,788,250,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 04 | Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota | Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimisasi SPALD-T Skala Kota | 500 rumah tangga | 500,000,000 | 500 rumah tangga | 550,000,000 | 500 rumah tangga | 605,000,000 | 500 rumah tangga | 665,500,000 | 500 rumah tangga | 722,000,000 | 2000 rumah tangga | 23,220,000,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 05 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Sseptik | 50 rumah Tangga | 6,000,000,000 | 50 rumah Tangga | 6,000,000,000 | 50 rumah Tangga | 6,000,000,000 | 50 rumah Tangga | 6,000,000,000 | 50 rumah Tangga | 6,000,000,000 | 200 Rumah Tangga | 24,000,000,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 07 | Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 Kegiatan | 100,000,000 | 100 orang | 200,000,000 | 100 orang | 220,000,000 | 100 orang | 242,000,000 | 100 orang | 266,200,000 | 500 orang | 1,028,200,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 08 | Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | 1 kelompok | 50,000,000 | 1 kelompok | 200,000,000 | 1 kelompok | 220,000,000 | 1 kelompok | 242,000,000 | 1 kelompok | 266,200,000 | 5 kelompok | 978,200,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 10 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik | Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara | 3 unit | 100,000,000 | 3 unit | 110,000,000 | 3 unit | 121,000,000 | 3 unit | 133,100,000 | 3 unit | 145,210,000 | 12 unit | 464,100,000 | | | | |
| berkurangnya wilayah yang menjadi rawan genangan | pengentasan wilayah perkotaan yang rawan genangan | berkurangnya luasan genangan di perkotaan | 1 | 03 | 06 | | | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE | Persentase Sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten terhadap jumlah kebutuhan drainase dalam kabupaten | 17.78% | 40% | 42% | 22,275,000,000 | 44% | 24,282,500,000 | 46% | 26,710,750,000 | 48% | 29,381,825,000 | 50% | 32,320,007,500 | 50% | 134,970,082,500 | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | | Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Panjang Unit Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4500 m | 4500 m | 22,275,000,000 | 4500 m | 24,282,500,000 | 4500 m | 26,710,750,000 | 4500 m | 29,381,825,000 | 4500 m | 32,320,007,500 | 22500 m | 134,970,082,500 | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun | 3 Dokumen | 600,000,000 | 3 Dokumen | 660,000,000 | 3 Dokumen | 726,000,000 | 3 Dokumen | 798,600,000 | 3 Dokumen | 878,460,000 | 12 Dokumen | 3,663,060,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 02 | Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan | Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun | 1 Dokumen | 500,000,000 | 1 Dokumen | 550,000,000 | 1 Dokumen | 605,000,000 | 1 Dokumen | 665,500,000 | 1 Dokumen | 732,050,000 | 5 Dokumen | 3,052,550,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 03 | Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | 3 Dokumen | 975,000,000 | 3 Dokumen | 1,072,500,000 | 3 Dokumen | 1,179,750,000 | 3 Dokumen | 1,297,725,000 | 3 Dokumen | 1,427,497,500 | 15 Dokumen | 5,952,472,500 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 05 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun | 33714 M | 4500 M | 17,500,000,000 | 4500 M | 19,250,000,000 | 4500 M | 21,175,000,000 | 4500 M | 23,292,500,000 | 4500 M | 25,621,750,000 | 56214 M | 106,839,250,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 06 | Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan | 1000 M | 1,000,000,000 | 1000 M | 1,100,000,000 | 1000 M | 1,210,000,000 | 1000 M | 1,331,000,000 | 1000 M | 1,464,100,000 | 5000 M | 6,105,100,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 07 | Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi | 1000 M | 1,000,000,000 | 1000 M | 1,100,000,000 | 1000 M | 1,210,000,000 | 1000 M | 1,331,000,000 | 1000 M | 1,464,100,000 | 5000 M | 6,105,100,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 08 | Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan | Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan | 4 Unit | 200,000,000 | 4 Unit | 220,000,000 | 4 Unit | 242,000,000 | 4 Unit | 266,200,000 | 4 Unit | 292,420,000 | 8 Unit | 200,000,000 | | | | |
| | | | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 09 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase | Panjang Saluran Drainase yang Diperasikan dan Dipelihara | 1000 M | 500,000,000 | 1000 M | 550,000,000 | 1000 M | 605,000,000 | 1000 M | 665,500,000 | 1000 M | 732,050,000 | 4000 M | 3,052,550,000 | | | | |
| terlambatnya tersedianya infrastruktur perwujudan pembangunan wilayah di kawasan strategis kabupaten | meningkatnya jumlah kawasan strategis kabupaten yang terdapat | | 1 | 03 | 07 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN | Persentase kawasan yang terdapat di wilayah kawasan strategis daerah kabupaten | - | 20% | 40% | 52,500,000,000 | 60% | 60,000,000,000 | 80% | 60,000,000,000 | 100% | 172,500,000,000 | | | | | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung jawab | | | |
|---|---|--|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|--|---|---|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------------|-------------|---|-------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp | |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | target | Rp | |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | | |
| | | | 1 | 03 | 07 | 2.01 | | Penyelenggaraan Infrastruktur pada Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 sistem jaringan | 52,500,000,000 | 0 | | 0 | | | 1 sistem jaringan | 0 | | | 5 sistem jaringan | 52,500,000,000 | | |
| | | | 1 | 03 | 07 | 1.01 | 01 | Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perumahan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Perumahan yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 sistem jaringan | 52,500,000,000 | | | | | | | | | | 5 sistem jaringan | 52,500,000,000 | | |
| tersedianya bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi | tersedianya pengelolaan dan pemanfaatan bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi | Jumlah bangunan gedung yang sesuai tata ruangannya | 1 | 03 | 08 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | Persentase bangunan Gedung yang di Tata Sesuai Perencanaan | 100% | | 100% | 72,800,000,000 | 100% | 72,300,000,000 | 100% | 72,800,000,000 | 100% | 72,300,000,000 | 100% | 72,800,000,000 | 100% | 363,000,000,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah bangunan gedung yang di bangun, di pelihara | | | 1 Unit | 72,800,000,000 | 1 Unit | 72,300,000,000 | 1 Unit | 72,800,000,000 | 1 Unit | 72,300,000,000 | 1 Unit | 72,800,000,000 | 1 Unit | 72,800,000,000 | 5 unit | 363,000,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 01 | Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG | | | 120 Dokumen | 900,000,000 | 120 Dokumen | 900,000,000 | 120 Dokumen | 900,000,000 | 120 Dokumen | 900,000,000 | 120 Dokumen | 900,000,000 | 120 Dokumen | 900,000,000 | 600 Dokumen | 4,500,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 02 | Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan, Rehabilitasi, Renovasi, Upahasi, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota | | | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 15 dokumen | 70,000,000,000 | 75 Unit | 350,000,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 03 | Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota | Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun | | | 3 Dokumen | 400,000,000 | 3 Dokumen | 400,000,000 | 3 Dokumen | 400,000,000 | 3 Dokumen | 400,000,000 | 3 Dokumen | 400,000,000 | 3 Dokumen | 400,000,000 | 15 Dokumen | 2,000,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 05 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota | | | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 5 Dokumen | 1,500,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 06 | Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan | | | 3 unit | 500,000,000 | | | 1 unit | 500,000,000 | | | 1 unit | 500,000,000 | | | 3 unit | 1,500,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 09 | Penilaian terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan | Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilaian oleh Penilik Bangunan | | | 5 unit | 500,000,000 | 5 unit | 500,000,000 | 5 unit | 500,000,000 | 5 unit | 500,000,000 | 5 unit | 500,000,000 | 5 unit | 500,000,000 | 25 unit | 2,500,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 10 | Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara | Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Telah Dilakukan Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) | | | 5 unit | 200,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | 5 unit | 200,000,000 | 25 unit | 1,000,000,000 | |
| tertatanya bangunan - bangunan yang berkesinambungan terhadap lingkungannya | tersedianya bangunan - bangunan yang berkesinambungan terhadap lingkungannya | Jumlah bangunan yang tertata beserta lingkungannya | 1 | 03 | 09 | | | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA | persentase bangunan dan lingkungannya yang tertata | 10% | | 25% | 5,800,000,000 | 50% | 8,100,000,000 | 75% | 9,560,000,000 | 100% | 11,312,000,000 | 100% | 13,414,400,000 | 100% | 48,186,400,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah bangunan dan lingkungan yang tertata | | | | 5,800,000,000 | | 8,100,000,000 | | 9,560,000,000 | | 11,312,000,000 | | 13,414,400,000 | | 48,186,400,000 | | | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 01 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota | | | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 10 Dokumen | 2,000,000,000 | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 02 | Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 2 dokumen | 400,000,000 | 10 Dokumen | 2,000,000,000 | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB-KELOMPOK | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung-jawab | | |
|---|--|---------------------------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--|---|---|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|----|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | | | | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 03 | Penataan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | 5,000,000,000 | 1 kawasan | 5,000,000,000 | 1 kawasan | 6,000,000,000 | 1 kawasan | 7,200,000,000 | 1 kawasan | 8,640,000,000 | 4 kawasan | 31,840,000,000 | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 04 | Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya | | 1 kawasan | 2,000,000,000 | 1 kawasan | 2,400,000,000 | 1 kawasan | 2,880,000,000 | 1 kawasan | 3,456,000,000 | 4 kawasan | 10,736,000,000 | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 06 | Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan | | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 360,000,000 | 1 dokumen | 432,000,000 | 1 dokumen | 518,400,000 | 4 dokumen | 1,610,400,000 | | | | | |
| kelancaran transportasi barang dan manusia di wilayah kabupaten | Meningkatnya kualitas jaringan jalan kabupaten | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 1 | 03 | 10 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | Persentase jalan dalam kondisi mantap | 33% | 43% | 45% | 533,200,000,000 | 47% | 597,400,000,000 | 49% | 627,270,000,000 | 51% | 658,633,500,000 | 53% | 691,565,175,000 | 53% | 3,108,068,675,000 | | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota | panjang jalan kabupaten yang di tingkatkan dan di pelihara | | | 50 km | 533,200,000,000 | 50 km | 597,400,000,000 | 50 km | 627,270,000,000 | 50 km | 658,633,500,000 | 50 km | 691,565,175,000 | 250 km | 3,108,068,675,000 | | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 01 | | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan | Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian | | | 5 dokumen | 4,000,000,000 | 5 dokumen | 4,200,000,000 | 5 dokumen | 4,410,000,000 | 5 dokumen | 4,630,500,000 | 5 dokumen | 4,862,025,000 | 25 Dokumen | 22,102,525,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 02 | | Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan | Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan | | | 10000 m2 | 10,000,000,000 | 10000 m2 | 15,000,000,000 | 10000 m2 | 15,750,000,000 | 10000 m2 | 16,537,500,000 | 10000 m2 | 17,364,375,000 | 50000 m2 | 74,651,875,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 03 | | Pengelolaan Leger Jalan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan | | | 1 dokumen | 2,000,000,000 | 1 dokumen | 5,000,000,000 | 1 dokumen | 5,250,000,000 | 1 dokumen | 5,512,500,000 | 1 dokumen | 5,788,125,000 | 5 dokumen | 23,550,625,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 04 | | Survey Kondisi Jalan/Jembatan | Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan | | | 1 dokumen | 700,000,000 | 1 dokumen | 800,000,000 | 1 dokumen | 840,000,000 | 1 dokumen | 882,000,000 | 1 dokumen | 926,100,000 | 5 dokumen | 4,148,100,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 05 | | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | | | 5 Km | 5,000,000,000 | 5 Km | 7,000,000,000 | 5 Km | 7,350,000,000 | 5 Km | 7,717,500,000 | 5 Km | 8,103,375,000 | 75 km | 35,170,875,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 08 | | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan | | | 30 km | 400,000,000,000 | 30 km | 420,000,000,000 | 30 km | 441,000,000,000 | 30 km | 463,050,000,000 | 30 km | 486,202,500,000 | 150 km | 2,210,252,500,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 10 | | Pemeliharaan Berkala Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala | | | 10 km | 28,000,000,000 | 10 km | 29,400,000,000 | 10 km | 30,870,000,000 | 10 km | 32,413,500,000 | 10 km | 34,034,175,000 | 50 km | 154,717,675,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 11 | | Pemeliharaan Rutin Jalan | Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin | | | 10 km | 20,000,000,000 | 10 km | 21,000,000,000 | 10 km | 22,050,000,000 | 10 km | 23,152,500,000 | 10 km | 24,310,125,000 | 50 km | 110,512,625,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 12 | | Pembangunan Jembatan | Jumlah Jembatan yang Dibangun | | | 5 unit | 50,000,000,000 | 7 unit | 70,000,000,000 | 7 unit | 73,500,000,000 | 7 unit | 77,175,000,000 | 7 unit | 81,033,750,000 | 33 unit | 351,708,750,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 18 | | Rehabilitasi Jembatan | Jumlah Jembatan yang di rehabilitasi | | | 10 unit | 5,000,000,000 | 10 unit | 10,000,000,000 | 10 unit | 10,500,000,000 | 10 unit | 11,025,000,000 | 10 unit | 11,576,250,000 | 50 unit | 48,101,250,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 19 | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | Jumlah Jembatan yang di Pelihara Rutin | | | 10 unit | 3,500,000,000 | 10 unit | 5,000,000,000 | 10 unit | 5,250,000,000 | 10 unit | 5,512,500,000 | 10 unit | 5,788,125,000 | 50 unit | 25,050,625,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 20 | | Pemeliharaan Berkala Jembatan | Jumlah Jembatan yang di pelihara berkala | | | 10 unit | 3,000,000,000 | 10 unit | 5,000,000,000 | 10 unit | 5,250,000,000 | 10 unit | 5,512,500,000 | 10 unit | 5,788,125,000 | 50 unit | 24,550,625,000 | |
| | | | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 21 | | Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat | Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/ Terekonstruksi Akibat Bencana | | | 2 km | 2,000,000,000 | 2 km | 5,000,000,000 | 2 km | 5,250,000,000 | 2 km | 5,512,500,000 | 2 km | 5,788,125,000 | 10 km | 23,550,625,000 | |
| | | | 1 | 03 | 11 | | | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | Persentase tenaga terampil konstruksi terlatih terhadap jumlah kebutuhan tenaga terampil konstruksi | 5.63% | 8.63 | 15.63% | 971,900,000 | 17.63% | 1,010,000,000 | 20.63% | 1,212,000,000 | 25.63% | 1,454,400,000 | 30.63% | 1,745,280,000 | 30.63% | 6,860,480,000 | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | rasio tenaga terampil konstruksi terlatih terhadap tenaga terampil dalam kabupaten | 5.63 | 8.63 | 15.63% | 811,900,000 | 17.63% | 830,000,000 | 20.63% | 996,000,000 | 25.63% | 1,195,200,000 | 30.63% | 1,434,240,000 | 30.63% | 5,734,240,000 | | |

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URSAH | BIDANG URSAHAN | PROGRAM | KELOMPOK | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penanggung jawab | | | | | | |
|--|---|--|-------|----------------|--|--|--------------|---|---|---|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-----------------|---|-------------------|------------------|-------------------|----|-------------------|--|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp | | | | |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | | | | | |
| -1- | -2- | | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | | | | | |
| Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi | Tersedianya penyedia jasa konstruksi yang handal | Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 03 | Penyusunan SOP penyelenggaraan pelatihan Tenaga terampil konstruksi | Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli | 1 Dokumen | 25,000,000 | | 1 Dokumen | 25,000,000 | | | | | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 04 | Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknis atau Analis yang Mengikuti Pelatihan | 225 orang | 200 | 466,900,000 | 200 Orang | 466,900,000 | 200 Orang | 480,000,000 | 200 Orang | 576,000,000 | 200 Orang | 691,200,000 | 200 Orang | 829,440,000 | 4000 orang | 3,510,440,000 | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 07 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi | 50 orang | | 50 orang | 260,000,000 | 50 orang | 290,000,000 | 50 orang | 348,000,000 | 50 orang | 417,600,000 | 50 orang | 501,120,000 | 250 orang | 1,816,720,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 08 | Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi | 1 Dokumen | | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 60,000,000 | 1 Dokumen | 72,000,000 | 1 Dokumen | 86,400,000 | 1 Dokumen | 103,680,000 | 5 Dokumen | 382,080,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang update dan andal | | | 1 Laporan | 160,000,000 | 1 Laporan | 180,000,000 | 1 Laporan | 216,000,000 | 1 Laporan | 259,200,000 | 1 Laporan | 311,040,000 | 5 laporan | 1,126,240,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 01 | Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi | | | 1 laporan | 130,000,000 | 1 laporan | 150,000,000 | 1 laporan | 180,000,000 | 1 laporan | 216,000,000 | 1 laporan | 259,200,000 | 5 laporan | 935,200,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 06 | Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha | 1 dokumen | | 1 dokumen | 30,000,000 | 1 dokumen | 30,000,000 | 1 dokumen | 36,000,000 | 1 dokumen | 43,200,000 | 1 dokumen | 51,840,000 | 5 dokumen | 191,040,000 | | | | | | |
| Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku | Jumlah Peraturan / kebijakan tata ruang kabupaten | | 1 | 03 | 12 | | | PROGRAM PENYELONGGARAAN PENATAAN RUANG | Jumlah rekomendasi yang di berikan yang sesuai dengan tata ruang nya | 51 rekom | | 25 rekom | 5,410,000,000 | 45 rekom | 7,832,000,000 | 45 rekom | 8,498,400,000 | 45 rekom | 10,838,080,000 | 45 rekom | 32,578,480,000 | 205 rekom | 46,584,176,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | tersedianya dokumen RTRW, RRTR dan RDTR Kabupaten | 3 buku | 1,900,000,000 | 5 buku | 3,660,000,000 | 4 buku | 5,792,000,000 | 4 buku | 6,110,400,000 | 4 buku | 8,032,480,000 | 3 buku | 8,798,976,000 | 23 buku | 34,293,856,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 01 | Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 700,000,000 | | | 1 dokumen | 700,000,000 | | | 1 dokumen | 700,000,000 | | | 1 buku | 2,100,000,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 02 | Pelaksanaan Peretujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota | 8 buku | 2,200,000,000 | 3 dokumen | 1,800,000,000 | 2 dokumen | 2,160,000,000 | 2 dokumen | 2,592,000,000 | 2 dokumen | 3,110,400,000 | 2 dokumen | 3,732,480,000 | 12 dokumen | 14,594,880,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 03 | Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota | | | 1 dokumen | 1,500,000,000 | 3 dokumen | 2,500,000,000 | 3 dokumen | 3,000,000,000 | 3 dokumen | 3,600,000,000 | 4 dokumen | 4,320,000,000 | 14 dokumen | 14,920,000,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 04 | Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang | 1 dokumen | | 1 dokumen | 360,000,000 | 2 dokumen | 432,000,000 | 2 dokumen | 518,400,000 | 2 dokumen | 622,080,000 | 2 dokumen | 746,496,000 | 9 dokumen | 2,678,976,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.02 | | Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi ruang yang diberikan | 51 dokumen | | 25 dokumen | 450,000,000 | 45 dokumen | 540,000,000 | 45 dokumen | 648,000,000 | 45 dokumen | 777,600,000 | 45 dokumen | 933,120,000 | 205 dokumen | 3,348,720,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 03 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat | 51 dokumen | | 25 dokumen | 450,000,000 | 45 dokumen | 540,000,000 | 45 dokumen | 648,000,000 | 45 dokumen | 777,600,000 | 45 dokumen | 933,120,000 | 205 dokumen | 3,348,720,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.03 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | tercapainya kesepakatan untuk pemanfaatan ruang dan investasi pembangunan | | | 1 dokumen | 1,000,000,000 | 1 dokumen | 1,200,000,000 | 1 dokumen | 1,440,000,000 | 1 dokumen | 1,728,000,000 | 1 dokumen | 2,073,600,000 | 5 dokumen | 7,441,600,000 | | | | | | |
| | | | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah | | | 1 dokumen | 1,000,000,000 | 1 dokumen | 1,200,000,000 | 1 dokumen | 1,440,000,000 | 1 dokumen | 1,728,000,000 | 1 dokumen | 2,073,600,000 | 5 dokumen | 7,441,600,000 | | | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah rekomendasi ruang yang di awasi | | | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 5 dokumen | 1,500,000,000 | | | | | | | | | |
| 1 | 03 | 12 | 2.04 | 04 | Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang | | | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 1 dokumen | 300,000,000 | 5 dokumen | 1,500,000,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 868,101,744,084 | | | | | | | | | | 951,383,528,435 | | 1,070,869,200,696 | | 1,103,025,757,666 | | 1,117,919,796,340 | | 5,087,826,143,221 | |

Kuala Tungkal, Juni 2022

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

APRI DASMAN, S.ST.MT.
NIP. 19730405 199303 1 004

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | URUSAN | BIDANG URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN | NOMENKLATUR | Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026) | | Penang- gung jawab | | |
|--------|---------|-------------------|--------|---------------|---------|----------|--------------|-------------|--|--|---|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--|------|-----------------------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | target | Rp |
| | | | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| -1- | | 2- | | | | | | | -7- | -8- | -9- | -10- | -11- | -12- | -13- | -14- | -15- | -16- | -17- | -18- | -19- | -18- | -19- | -20- | |



BAB VIII

PENUTUP

Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar senantiasa mampu mengikuti setiap perubahan, sehingga tetap eksis dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki. Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 terutama yang berkaitan dengan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dipakai sebagai rujukan dalam penyusunan rencana kerja tahunan guna menjamin kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah.

Dengan melaksanakan Rancangan Akhir Rencana Strategis ini sangat diharapkan adanya komitmen dari seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rancangan Akhir Rencana Strategis ini diharapkan bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, melainkan merupakan cerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

